

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 12, Januari, 2024****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10569460)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10569460>**

Peran Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam Peningkatan Kualitas Hasil Panen Pisang di Desa Sajau Hilir Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Muhammad Al Bahasyim¹, Nurus Soimah², Dewi Qomariah Imelda³, Aslan⁴, Hermawan⁵

¹²³⁴⁵Universitas Kaltara, Tanjung Selor

Email: nurussoimah@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten bulungan terhadap peningkatan kualitas hasil panen pisang di desa saju hilir sebagai upaya mensejahterakan masyarakat setempat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat, baik itu petani ataupun masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran pemerintah kabupaten bulungan dalam peningkatan kualitas hasil panen pisang di desa saju hilir berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah pernah dilakukan seperti memberikan pupuk dan melaksanakan pelatihan kepada petani pisang sampai tahap olahan pasca panen, akan tetapi masalah yang dihadapi oleh petani ialah harga jual dari buah pisang mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga banyak yang meninggalkannya, pada saat ini pemerintah lebih terfokus kepada peningkatan produksi padi, kedelai, dan jagung, ini menjadi salah satu penyebab tanaman pisang hanya di jadikan sampingan oleh petani di desa saju hilir.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Kualitas Hasil Panen

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Bulungan district government in improving the quality of banana crops in the village of Downstream as an effort to prosper the local community. The type of research used descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interview and documentation. The respondents in this study were local people, both farmers and village officials. The results of the study showed that the role of the Bulungan district government in increasing the quality of banana harvest in the village of Sajau Hilir is going well; Field extension workers have already been carried out such as providing fertilizer and conducting the training for banana farmers until the post-harvest processing stage, but the problem faced by farmers were that the selling price of bananas has decreased sharply so that many have left, at this time the government was more focused on increased production of rice, soybeans, and corn, this is one of the causes of banana plantations being used by the farmers in the lower reaches of the village.

Keywords: Role of Government, Quality of Harvesting Result

Article Info

Received date: 25 December 2023

Revised date: 10 Januari 2024

Accepted date: 25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan sosial ekonomi sebuah negara. Kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan diantaranya: pertanian berfungsi sebagai produsen bahan pangan dan serat, produsen bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber perolehan devisa, serta pertanian juga berfungsi dalam mengurangi kemiskinan. (Ilmi, 2016)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah di beri wewenang yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai

kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Fauzi, 2019)

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di tuntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab XI tentang keuangan daerah, diketahui bahwa salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam (PAD) terdapat pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan pilihan dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian;
- h) transmigrasi;

Bunyi pasal di atas diartikan bahwa Kabupaten Bulungan itu mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam pertanian baik di dalam administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, hak-hak yang dimaksud antara lain hak mengelola kekayaan daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Desa Sajau Hilir merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra pengembangan budidaya tanam pisang. Pisang yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Sajau Hilir memiliki kualitas yang cukup baik, hasil panen pisang di pasarkan hingga ke Tanjung Selor, Berau dan Samarinda. Mata pencaharian masyarakat Desa Sajau Hilir sangat beragam, diantaranya 85 % masyarakatnya bertani pisang, 3 % bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan lainnya bertani non pisang seperti ubi rambat, kacang tanah, padi, jagung, tomat, cabe, terong, dan lain-lain. Selain itu sebagian masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai penjual sembako dan pengusaha udang kering. Alasan peneliti mengambil judul tersebut karena melihat kondisi budidaya pisang yang dahulu sempat mengalami peningkatan namun beberapa tahun belakangan ini mulai mengalami penurunan.

(Nurdin et al., 2014) menyatakan bahwa Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor industrialisasi. Konsep strategi pembangunan berimbang (*balanced growth*), yaitu pembangunan di sektor pertanian khususnya petani jagung dan sektor industri secara bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara berkembang, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai untuk melakukan pembangunan dibidang pertanian dan bidang industri sekaligus.

(Maindoka & Irna, 2016) menyatakan bahwa peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembinaan dan penyuluhan, berjalan dengan baik. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pengawas penangkar benih, pemberi bantuan bibit unggul, pendorong kemajuan teknologi, pendampingan dalam pengelolaan lahan, dan pendampingan dalam kelembagaan petani. Namun pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah belum berhasil sepenuhnya, karena jika dilihat dari keadaan petani yang ada dilapangan saat ini, petani masih mengalami ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, dan juga petani kentang belum mampu menaikkan kembali produktifitasnya hingga mengeksport hasil pertaniannya. Sehingga tujuan dari pemberdayaan untuk membuat petani mandiri, dan berdaya saing belum dapat tercapai.

(Sandartha, 2012) menyatakan bahwa Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya sektor agraris sebagai *leading* sektor pembangunan daerah,

Arah kebijakan Revitalisasi Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas di Kabupaten Lamongan adalah untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta petani dan nelayan pada khususnya dengan tujuan menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah Jawa Timur. Upaya tersebut diimplementasikan dengan beberapa kebijakan dan program penguatan baik pada tahap off farm dan on farm utamanya kegiatan teknologi budidaya tanaman serta pengolahan dan pemasaran khususnya tanaman pangan (padi dan palawija).

Di sisi lain upaya peningkatan produksi beras menghadapi berbagai tantangan seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran irigasi dan stagnasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Permasalahan utamanya adalah kurangnya intensifikasi pada padi lahan kering atau lahan basah dan kurang irigasi bagi padi lahan basah, dan belum efektifnya pengembangan padi pasang surut, demikian juga pada tanaman palawija yang masih dibudidayakan dalam skala kecil. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satunya adalah perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan merupakan salah satu pilihan strategis yang tepat dalam menanggulangi problem ketahanan pangan. Karena selama ini keterbatasan lahan pertanian menjadi masalah tersendiri dalam ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting bagi kita untuk dapat mengetahui sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya peningkatan kualitas hasil panen pisang di Desa Sajau Hilir.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2013) Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang peran pemerintah kabupaten bulungan dalam peningkatan kualitas hasil Panen Pisang di Desa Sajau hilir sebagai upaya mensejahterakan masyarakat setempat.

Menurut (Sugiyono, 2018) Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bogdan dalam (Sugiyono, 2017)), analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuan nya dapat informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Budidaya Pisang di Desa Sajau Hilir

Sajau Hilir adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Berdasarkan sumber dari Profil Desa Sajau Hilir 2019 luas wilayah keseluruhan adalah 4914 ha yang sebagian besarnya adalah wilayah pertanian/perkebunan yaitu sebesar 3000 ha atau 61.05 persen dari luas wilayah Desa. Ada beberapa jenis tumbuhan yang di budidayakan oleh masyarakat atau petani seperti Padi, Pisang dan Kelapa Sawit.

Dari ketiga jenis tanaman tersebut masing-masing memiliki kendala yang cukup bervariasi yaitu serangan hama penyakit, pasar yang tidak tersedia dan harga yang sangat rendah khususnya pada tanaman pisang. Hal ini menjadi kendala utama yang dihadapi oleh petani atau masyarakat yang membudidayakannya dan tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk meninggalkan budidaya pisang dan beralih ke padi. Desa Sajau Hilir termasuk salah satu desa penghasil pisang terbaik di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan mempunyai cita rasa yang sedikit agak berbeda, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sajau Hilir. Beliau juga mengatakan beberapa yang lalu Sajau Hilir menjadi rujukan utama para konsumen walaupun harga jual pisang mencapai Rp. 4.000 dan sempat termahal mencapai Rp. 5.000 /sisir nya. Dari penjualan itu pun tidak sedikit masyarakat yang mengantungkan hidupnya pada buah pisang.

Kualitas Hasil Panen Pisang

Beberapa tahun terakhir pisang tidak lagi begitu di perhatikan oleh masyarakat atau petani di sebabkan harga jual pisang yang terbilang rendah, sehingga keinginan masyarakat atau petani untuk membudidayakan pisang semakin berkurang. Namun sekarang harga jual pisang kembali stabil yaitu mencapai Rp. 4.000/sisir. Hal itu dapat kita lihat dari jumlah pendapatan Petani Pisang di Desa Sajau Hilir sebanyak 75 orang, dimana petani pisang dapat memanen pisang sebanyak 2 kali dalam sebulan.

Di Desa Sajau Hilir terdapat 75 KK yang memanfaatkan lahannya untuk menanam pisang, dengan rata-rata pendapatan pisang sebesar Rp. 5.625.333,- dengan asumsi harga pisang Rp. 4.000,- per sisir. Dalam satu bulan petani pisang dapat memanen pisang sebanyak 2 kali panen dengan rata-rata panen sebanyak 703 sisir sekali panen atau 1.406 sisir dalam satu bulan. Pendapatan terendah petani pisang sebanyak 900 sisir dalam satu bulan atau Rp. 3.600.000,- dalam satu bulan. Sedangkan pendapatan terbanyak petani pisang sebanyak 1.800 sisir dalam satu bulan atau Rp. 7.200.000,- per bulan. Pembeli yang datang dari bermacam-macam daerah salah satunya dari Balikpapan, Berau, Sangata, Samarinda dan beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bulungan.

Dari hasil panen yang berlimpah ini terkadang petani juga sedikit kewalahan ketika harga pisang yang tiba-tiba turun sehingga banyak pisang yang tidak terjual sampai akhirnya membusuk. Melihat kondisi seperti ini, ibu-ibu yang tergabung dalam Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berinisiatif menciptakan produk pasca panen yang di olah menjadi keripik pisang dengan varian rasa yang berbeda-beda. Berselang beberapa lama produk olahan berbahan dasar pisang ini mulai di tinggalkan karena tidak tersedianya pasar.

Kepala Desa Sajau Hilir juga menghimbau kepada petani pisang dan masyarakat untuk dapat bersinergi dalam menciptakan produk olahan pasca panen. Beliau juga telah melakukan kunjungan ke beberapa universitas dan meminta untuk mengadakan study atau penelitian di Desa Sajau Hilir agar dari hasil penelitian tersebut dapat menciptakan solusi yang tepat dalam meningkatkan pertanian di Desa Sajau Hilir. Harapan beliau terhadap pemerintah daerah kedepannya dapat memfasilitasi atau memberikan pembimbingan dan pelatihan kepada petani atau masyarakat untuk mengelola produk olahan pisang pasca panen sehingga nantinya Desa Sajau Hilir memiliki produk lokal unggulan khas daerah seperti tepung pisang

Peran Pemerintah Dalam Bidang Pertanian di Kabupaten Bulungan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. ((Soekanto, 2009)). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, serta pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Peran Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dalam Bidang Pertanian tertera dalam visinya yaitu mewujudkan kabupaten bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dinas pertanian membuat rumusan berupa misi yang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.

Misi pertama dinas pertanian kabupaten bulungan adalah mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional. Sedangkan strategi yang digunakan untuk mencapai misi tersebut adalah dengan menciptakan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta pemasaran produk pertanian.

Delta kayan food estate (DeKaFe) merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten bulungan. Program ini merupakan salah satu opsi dalam mengatasi permasalahan pangan di Kabupaten Bulungan. Program ini merupakan program terobosan yang dicoba untuk diperkenalkan dan diimplementasikan untuk mengejar pemenuhan kebutuhan pangan provinsi maupun nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan aparat desa dan ketua gapoktan dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pernah melaksanakan program kerja terkait pertanian pisang yaitu pembimbingan pengolahan pasca panen pisang, seperti keripik pisang. Namun kendala dalam

pelaksanaan yang dihadapi oleh petani yaitu proses pemasaran produk tersebut sehingga program ini perlahan di tinggalkan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan lebih terfokus kepada peningkatan produksi padi, kedelai, dan jagung. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap petani di Desa Sajau Hilir adalah pemebrian alat bajak sawah (traktor), mesin penggiling padi, pemberian bibit padi, penyuluhan dan pendampingan produksi padi. Hal ini menjadi salah satu penyebab tanaman pisang hanya di jadikan sampingan oleh petani di Desa Sajau Hilir.

SIMPULAN

- a) Petani beberapa tahun terakhir ini pisang tidak lagi begitu di perhatikan oleh mereka karena harga jual yang begitu rendah, dan kesulitan dalam proses memasarkannya. Melihat kondisi di atas banyak dari petani pisang yang beralih profesi menjadi petani padi. Tidak hanya itu serangan hama penyakit pada tanaman pisang juga menjadi salah satu kendala dalam pembudidayaannya sehingga banyak yang gagal panen. Kelompok Tani juga memberikan gambaran tentang penyediaan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian serta ketersediaan pasar yang minim untuk buah pisang sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani karena adanya pengeluaran dan pemasukan yang tidak seimbang.
- b) Fokus kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten bulungan pada saat ini adalah untuk peningkatan produksi padi, kedelai, dan jagung. Hal ini menjelaskan bahwa pisang tidak masuk dalam fokus kebijakan pertanian Kabupaten Bulungan Tahun ini. Delta kayan food estate (DeKaFe) juga menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan

REFERENSI

- Fauzi, A. 2019. Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1).
- Ilmi, D. R. 2016. *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Rumah Tangga Petani pada Usaha Non- Pertanian di Kota Payakumbuh* [Skripsi+]. Universitas Andalas.
- Maindoka, & Irna. 2016. Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Petani Hortikultura di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(7).
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas*, IV(1).
- Sandartha, W. I. 2012. *Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan* [Skripsi]. UMM.
- Soekanto, S. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. CV Alfabeta.